

**ANALISIS KEPENTINGAN POLITIK PADA KONFLIK SENGKETA
ANTARA MASYARAKAT TEGAL BINANGUN DENGAN
KABUPATEN BANYUASIN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik**

Oleh :

M. AGUNG KURNIAWAN

1657020070

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

RADEN FATAH PALEMBANG

1442H/2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep otonomi daerah pada hakekatnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif. Oleh karena itu, kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Ketidak mandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat. Dengan demikian hal yang menyertai pelaksanaan otonomi daerah adalah pemindahan wilayah. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administratif (Hari Subamo,2008).

Dengan mendukung peningkatan pelayanan publik di tingkat daerah dan nasional, mengakselerasi pembangunan ekonomi, baik ekonomi daerah maupun ekonomi nasional dengan cara yang seefisien mungkin, meningkatkan stabilitas politik, baik dalam rangka meningkatkan dukungan daerah terhadap



pemerintahan nasional, maupun dalam rangka pengelolaan stabilitas politik dan integrasi nasional. Indikator ini akan digunakan untuk melihat dampak pemindahan daerah, walaupun dampak tersebut tidak bisa digambarkan secara hitam putih, tetapi digambarkan dalam situasi yang dilematis.

Hal ini disebabkan karena faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah penduduk. Penduduk sebagai sumber daya yang menyediakan modal manusia dalam kegiatan perekonomian. Partisipasi aktif dari masyarakat akan mempercepat pembangunan suatu wilayah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap wilayah tersebut yang didukung oleh kinerja ekonomi yang lebih baik. bukan hanya untuk kepentingan daerah, tetapi juga untuk pemenuhan kepentingan nasional. Oleh karena itu, alternatif rumusan dari tujuan kebijakan penataan daerah merupakan kebijakan pemekaran dan penggabungan daerah.

Pembangunan daerah bagian integral dari pembangunan nasional yang dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek terpenting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan penggabungan dan pembagian daerah yang bertujuan untuk

memperkuat hubungan antara pemerintah lokal dan masyarakat lokal serta meningkatkan pelayanan kepada publik.

Otonomi daerah itu sendiri di dalam penyelenggaraannya di pandang perlu lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, diantaranya faktor-faktor geografis yang mencakup potensi daerah (sumber daya alam), Luas Daerah, jumlah penduduk, dan kondisi fasilitas-fasilitas masyarakat umum. Serta hal yang menjadi pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah, dalam hal ini pemindahan wilayah (Saeful Anwar, 2014).

Wujud desentralistik salah satunya pemekaran ataupun pemindahan wilayah. pemekaran wilayah indonesia, merupakan hal yang di amanatkan oleh undang-undang tentang pembentukan wilayah administratif baru ditingkat provinsi, kota, dan kabupaten berdasarkan UU No 32 Tahun 2004. Adapun ketetapan pemerintah dalam mengatur pemindahan daerah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Pemindahan wilayah secara intensif berkembang di indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Kaputra Iswan,2013).



Tegal Binangun merupakan wilayah yang secara tapal batas masuk wilayah Banyuasin tapi warganya ingin berada dan masuk ke kota Palembang sedangkan daerah Talang Buloh yang seharusnya masuk di kota Palembang tapi warganya menginginkan berada di wilayah Banyuasin atas dasar itulah, Pemkot Palembang mengusulkan kepada pemerintah Provinsi untuk melakukan *change* kedua wilayah ini. Rencana perluasan wilayah dan kembali diambilnya Tegal Binangun masuk Teritori kota Palembang sudah masuk dalam pembahasan pemerintah Kota Palembang. Dengan menawarkan opsi tukar guling wilayah dengan Kabupaten Banyuasin (Tribunnews.com,2017).

Pada saat ini Tegal Binangun sudah sah masuk ke kawasan banyuasin, Pemkab Banyuasin sudah melakukan pengukuran ulang yang melibatkan Kota Palembang dan Provinsi Sumsel dan saat ini Tegal Binangun secara administratif masuk ke kawasan banyuasin warga Tegal Binangun yang merasa lebih mudah menjangkau Kota Palembang menolak bergabung dengan Kabupaten Banyuasin (Tribunnews.com, 2017). Masyarakat juga mengklaim bahwa selama ini minimnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Baik pembangunan infrastruktur maupun fasilitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam permasalahan pemindahan wilayah Tegal Binangun



ini Masyarakat menolak wilayah yang sudah puluhan tahun masuk wilayah Kabupaten Banyuasin dan tetap ingin menjadi warga Kota Palembang. Dari hasil rapat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Pemkot Palembang, Pemkab Banyuasin serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Pemprov Sumsel sebagai penengah mengusulkan Tegal Binangun masuk ke Kota Palembang (Tribunnews.com,2017).

Pemindahan wilayah Tegal binangun ini salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembangkan prakasa dari dalam, menumbuhkan kekuatan kekuatan baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas.

Pemindahan daerah Tegal Binangun hendak mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Salah satu alasan suatu daerah dipindahkan adalah besarnya wilayah suatu daerah, sehingga dengan dipindahkan menjadi dua atau lebih daerah otonom baru, maka pelayanan kepada masyarakat lebih dekat dan optimal. Mengembalikan daerah yang telah dipindahkan

kepada induknya sama dengan mengembalikan jauhnya pusat pelayanan masyarakat kepada rakyat setempat.

Tujuan masuknya wilayah Tegal Binangun ke Kota Palembang untuk mempermudah akses pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, penggabungan ini daerah bermotif rasional pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dengan meminimalkan alasan-alasan non-ekonomi (sejarah, budaya, latar belakang suku dan agama) didasari dan harus diupayakan oleh semua pihak untuk dilakukan secara demokratis, damai dan akuntabel (Tri Ratnawati, 2009).

Institusi yang dipilih secara langsung oleh rakyat, akan tercederai legitimasinya, lantaran kabupaten yang dipimpin pemerintahannya digabungkan dengan daerah asalnya, atau daerah yang berdampingan. Dalam hal ini, bukan hanya melahirkan problem teknis pemerintahan, melainkan juga secara filosofis akan mencederai pilihan politik khususnya di wilayah Tegal Binangun.

Pemerintah pusat perlu mempersempit jangkauan pengendalian dan mengusahakan efisiensi pelaksanaan pembangunan dengan cara melakukan pemindahan di daerah Kabupaten Banyuasin dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, potensi ekonomi Daerah serta faktor politik lainnya. Bahwa pemindahan Daerah erat kaitannya dengan pembangunan.



Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Terutama di daerah-daerah yang terbelakang, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi sehingga semakin tinggi pendapatan maka kesejahteraan akan tercapai (Michael P. Todaro,1997).

Secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintah tertentu yang diserahkan. Pembangunan daerah juga dipandang sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mampu mengelola sumber daya dan peluang yang ada sehingga membentuk pola kemitraan diantara keduanya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah Tegal Binangun.

Dalam pemindahan suatu daerah seringkali adanya unsur elit politik atau kepentingan elit politik. Semenjak pergantian Gubernur Sumatera Selatan dari Alex Noerdin ke Herman Deru, jalan di Tegal Binangun sudah mengalami perbaikan dan fasilitas publik seperti Puskesmas telah dibangun. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin sendiri telah mendirikan Puskesmas bagi masyarakat sekitar.

Beranjak pada berbagai kajian empiris dan kondisi faktual di atas maka menarik sekali untuk mengangkat suatu isi bagaimana sebelumnya kepentingan dari pemindahan wilayah

tersebut bagi perekonomian dan politik Provinsi Sumsel terutama jika dilihat pada indikator-indikator kesejahteraan masyarakat. Oleh peneliti tertarik mengangkat Penelitian ini dengan judul *Analisis Kepentingan Politik Pada konflik sengketa antara masyarakat Tegal Binangun dengan Kabupaten Banyuasin*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu:

1. Bagaimana proses perpindahan wilayah tegal binangun dari kabupaten Banyuasin ke kota Palembang?
2. Apakah terdapat kepentingan politik pada proses perpindahan wilayah tegal binangun dari kabupaten Banyuasin ke kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses perpindahan wilayah tegal binangun dari kabupaten Banyuasin ke kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kepentingan politik pada proses perpindahan wilayah tegal binangun dari kabupaten Banyuasin ke kota Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu politik terkhusus mahasiswa jurusan ilmu politik, dan masyarakat pada umumnya.

- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam pemerintahan serta dapat di jadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Rifki Pratama, (2010) dengan judul *"Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan"*. Penulis tersebut menyimpulkan bahwa pemekaran ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, pemekaran ini juga memiliki filosofi penting dalam konsep kelembagaannya, yaitu menjaga keekaragaman adat istiadat daerah yang telah menjadi ciri khusus dalam budaya nasional sehingga terhindar dari kontaminasi budaya barat yang semakin berkembang, dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia (Muhammad Rifki Pratama. (2010).

Skripsi ini menggunakan teori desentralisasi sebagai wujud dari tuntutan akan penerapan prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara, khususnya di tingkat daerah, karena salah satu prinsip demokrasi yang sejalan dengan ide desentralisasi

adalah adanya partisipasi dari masyarakat. Hal ini berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu dengan judul *Analisis Kepentingan Politik Pada Konflik Sengketa Masyarakat Tegal Binangun Dengan Kabupaten Banyuwangi* yaitu menggunakan teori elit politik yang menyatakan bahwa politik itu di dominasi oleh segelintir elit .

Silvana Yosephus dalam Penelitian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga) Pemekaran Wilayah kecamatan Tombariri Timur menjadi sebuah kecamatan sangat berdampak pada pelayanan publik di wilayah tersebut. Hal itu terlihat khususnya dalam hal administrasi pengurusan Kartu Keluarga yang menjadi objek penelitian tulisan ini. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan menggambarkan proses administrasi pembuatan Kartu Keluarga di kecamatan Tombariri Timur serta membandingkannya dengan proses yang sama pada saat sebelum di mekarkan. Menggunakan konsep pemerintah tentang pelayanan publik yang tertuang dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2003.

Kecamatan Tombariri Timur ini merupakan wilayah yang baru dimekarkan pada tahun 2012 dari wilayah induk yaitu kecamatan Tombariri. Pemekaran wilayah ini diperkuat dengan



Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 3 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kecamatan Tombariri Timur. Seperti yang terjadi pada wilayah-wilayah yang baru dimekarkan, pelayanan public yang sebenarnya menjadi alasan untuk dilakukan pemekaran tersebut justru menjadi masalah yang krusial. Demikian halnya yang terjadi di wilayah kecamatan Tombariri Timur (Silvana Yosephus,2014).

Masyarakat sebagai pihak yang dilayani tentunya mengharapkan bisa mendapatkan pelayanan Pemekaran wilayah selayaknya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan disamping memperhatikan persyaratan yang sudah diatur pemerintah dalam PP No. 129 tahun 2000 yang telah disempurnakan dengan PP No. 17 Tahun 2008 tentang pembentukan suatu daerah otonom. Dalam peraturan pemerintah tersebut sudah diatur bahwa pembentukan daerah otonom baru dimungkinkan dan harus memenuhi faktor-faktor antara lain : kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah disamping faktor lain yaitu keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana, rentang kendali yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti yang diharapkan.

Lukman santoso (2012), dengan judul *Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, jurnal ini menjelaskan tentang problematika pemekaran yang ada di Indonesia dari mulai keluarnya UU No 22 Tahun 1999 yang

kemudian di revisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah. Problematika pemekaran di Indonesia dalam pelaksanaannya ternyata menjadi faktor politik lebih dominan dalam proses pemekaran daerah.

Jurnal ini menjelaskan konsep demokrasi sejalan dengan konsep desentralisasi, perspektif di gunakan jurnal ini ialah menggunakan perspektif desentralisasi politik dan perspektif desentralisasi administrasi. Perspektif desentralisasi politik menerjemahkan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sedangkan perspektif desentralisasi administrasi dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah (Lukman santoso,2012).

Fina Dian Arini(2016) dalam *Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Pada Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)* menganalisis dampak pemekaran kecamatan Payaraman terhadap pelayanan pada masyarakat, mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh aparat kecamatan Payaraman, dan untuk mengetahui korelasi antara dampak pemekaran kecamatan dengan pelayanan pada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

induktif. Untuk mencari korelasi antar variabel, raka analisis yang digunakan adalah uji statistik dengan menggunakan data yang ikuantitatifkan, yaitu mendeskripsikan data kualifikator dengan menggunakan skor, emudian dicari koefesiensi korelasinya dengan. Menggunakan rumus product moment. Ralam penelitian ini, data yang ilikumpulkan adalah dua variabel pokok yang terdiri dari variabel pemekaran kecamatan (x) dan variabel pelayanan (y).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran kecamatan berpengaruh positif terhadap mutu pelayanan pada masyarakat di kecamatan payaraman kabupaten ogan ilir. Hal ini tergambar dari diterimanya hasil hipotesis yang diajukan. Adapun pemekaran .ecamatan mempengaruhi mutu pelayanan pada masyarakat, ini menunjukkan emekaran berjalan dengan baik dan lancar sehingga mutu dari pelayanan yang diberikan apat menyentuh masyarakat, perbedaan yang akan di teliti oleh penulis adalah dimana peneliti ingin meneliti tentang *Analisis Kepentingan Politik Pada Konflik Sengketa Antara Masyarakat Tegal Binangun Dengan Banyuasin*.

Welhelmina selfina (2015) dengan Judul *Peran Elit Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT*. jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan juga penelitian ini di fokuskan untuk memetakan elite politik lokal yang mempengaruhi proses



pemekaran kabupaten pantar dan menganalisis peran lokal dalam upaya mewujudkan pemekaran kabupaten pantar provinsi nusa tenggara timur. Dengan demikian hal ini berbeda dengan penelitian teliti dengan memfokuskan pada proses pemekaran wilayah pantai timur.

Jurnal ini juga mengungkapkan bahwa pemekaran sebagai proses “pemecahan kekuasaan” akhirnya mengarah pada konstetasi para pejabat-pejabat lokal untuk mengakui tuntutan-tuntutan lokal untuk menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Elit politik lokal seperti haus akan kekuasaan, sebab mereka yang kalah dalam pilkada kadang menjadikan isu pemekaran ini sebagai sarana empuk dalam memobilisasi keinginan mereka untuk menggapai kekuasaan yang baru begitu juga dengan pemekaran kabupaten pantar yang di dominasi oleh kepentingan elite dalam memperebutkan kekuasaan di tingkat lokal.

Djoko harmanto (2017) melakukan penelitian dengan judul “pemekaran daerah Dan konflik keruangan kebijakan otonomi daerah dan implementasinya di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak Daerah pemekaran, semakin banyak potensi konflik keruangan karena jumlah garis batas antar wilayah sebagian sumber konflik jumlahnya semakin banyak.

Dari beberapa penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang peneliti analisis yaitu *Kepentingan Politik Pada konflik sengketa Tegal Binangun dengan Kabupaten Banyuasin* Yang bertujuan untuk melihat bagaimana kepentingan ekonomi dan kepentingan politik dalam pemindahan wilayah di Tegal Binangun penelitian ini akan menggambarkan bagaimana sejarah proses dan respon masyarakat perpindahan wilayah Tegal Binangun.

F. Kerangka Teori

Perkembangan sentra pertumbuhan wilayah bersifat langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi sub regional melalui ekonomi dan hubungan sosial: urbanisasi, industri perkembangan, pertumbuhan per-kapita, jumlah yang lebih tinggi lembaga pendidikan dan sebagainya. Namun, pertumbuhan seperti itu berkorelasi negatif dengan persamaan ekonomi di antara provinsi di sub-wilayah lainnya. (Sang-Arun, N.2013).

Kecenderungan ketidaksetaraan itu jelas pada kemajuan. Studi ini menunjukkan bahwa industri hubungan antara pusat pertumbuhan regional dan satelit mereka wilayah kota harus ditingkatkan agar pertumbuhan daerah pengembangan pusat memiliki efek yang selalu diinginkan pada kedua pertumbuhan ekonomi dan persamaan. Begitu kuat Proses berarti pertumbuhan pusat pertumbuhan regional akan menyebar, menuju perkembangan lingkungan sekitar wilayah kota.

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang orang yang ada dalam masyarakat dan menempati

kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal dan elite non politik non lokal.

Seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Elite politiknya seperti: Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik. Sedangkan Elite Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe elite lokal ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar-elite politik maupun elite masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal.

Pareto (1848-1923), Bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlakukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik. Mereka yang bias menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik merekalah yang dikenal sebagai elit.



Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya.

Karena itu menurut Pareto, masyarakat terdiri dari 2 kelas: (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elit*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elit*), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah, yang menurut dia berkuasa karena bias menggabungkan kekuasaan-kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting (S.P. Varman, 2001).

Menjelaskan struktur kesadaran dalam pengalaman manusia terhadap suatu kepentingan, dari individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Hal ini kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip filosofis kepentingan dari elite politik dan studi diakhiri dengan esensi dari makna dengan demikian, dapat dipahami mengenai kerangka teori dalam penelitian ini yang akan diteliti menggunakan teori elite kepentingan, peneliti memilih teori ini karena dalam teori ini menampilkan Kepentingan Politik Dan

Ekonomi. Berdasarkan analisis yang peneliti angkat, hal ini sangat berkaitan dengan judul peneliti yang menganalisa Kepentingan Politik Pada Konflik Sengketa Perpindahan Wilayah Antara Masyarakat Tegal Binangun Dengan Kabupaten Banyuasin.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian ini adalah analisis dimana menganalisis suatu fenomena atau setting *social* yang bersifat naratif, yang artinya data dan fakta di kumpulkan berbentuk kata atau gambar, dengan menganalisis apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi, dalam laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data dan fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan, melalui data yang ada di lapangan(Djam'an Satori ,2011). Sehingga peneliti akan menyajikan dalam bentuk kualitatif untuk meneliti Analisis Kepentingan Politik Pada Konflik Sengketa Perpindahan Wilayah Antara Masyarakat Tegal Binangun Dengan Kabupaten Banyuasin.

2. Data dan Sumber Data

a. Data primer yaitu sumber data yang di peroleh secara langsung baik menggunakan teknik wawancara, jejak pendapat dari suatu kelompok maupun individu dan juga baik hasil observasi yang telah dilakukan. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam

penelitian ini sebanyak 10 orang yaitu : Elit Politik (Anggota DPRD Kota Palembang Dan Anggota DPRD Banyuasin), Tokoh masyarakat Tegal Binangun, dan masyarakat Tegal Binangun.

- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan media prantara baik berupa buku, arsipan baik yang di simpan maupun di publikasi serta catatan-catatan, dokumen, foto yang berkaitan dengan judul Analisis Kepentingan Politik Pada Konflik Sengketa Perpindahan Wilayah Antara Masyarakat Tegal Binangun Dengan Kabupaten Banyuasin..

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawaban yang dilakukan peneliti dengan informannya, untuk mendapat informasi melalui sesi tanya jawab yang telah tersusun sistematis. Wawancara sendiri bertujuan untuk mencari informasi yang rinci baik itu dari pendapat informan, pengalaman, kesan maupun pemikiran informan tersebut yang berkaitan dengan Analisis Kepentingan Politik Pada Konflik Sengketa Perpindahan Wilayah Antara Masyarakat Tegal Binangun Dengan Kabupaten Banyuasin.

4. Dokumentasi adalah sebuah catatan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi yang berisikan tentang foto, video, serta data-data

yang berkaitan dengan Analisis Kepentingan Politik Pada Konflik Sengketa Perpindahan Wilayah Antara Masyarakat Tegal Binangun Dengan Kabupaten Banyuasin.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah kabupaten Banyuasin dan kota Palembang khususnya wilayah Tegal Binangun, yang memiliki fokus pada menganalisis Kepentingan Politik Pada Proses Perpindahan Wilayah Tegal Binangun Dari Kabupaten Banyuasin Ke Kota Palembang dengan ini yang menjadi perhatian dari analisis Kepentingan Politik Pada Proses Perpindahan Wilayah Tegal Binangun Dari Kabupaten Banyuasin Ke Kota Palembang adalah dari masyarakat Tegal Binangun sebagai responden, untuk mendokumentasikan pernyataan-pernyataan dari responden yang diwawancarai, peneliti akan melakukan dokumentasi berupa foto-foto atau perekaman, setelah melakukan wawancara kemudian peneliti akan melakukan *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang didapatkan dari responden.

6. Tehnik Analisis Data

Setelah informasi data terkumpul selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut. Dalam penelitian ini digunakan beberapa tahap teknik analisa data, yaitu pertama reduksi data ialah tahap analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan

membuang data yang tidak perlu.

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus. Banyak informasi yang diperoleh peneliti, namun tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam masalah penelitian. Untuk itulah, reduksi data perlu dilakukan setiap saat, sedikit demi sedikit, karena bila proses dilakukan di akhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring.
- b. Penyajian data, yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh.
- c. Verifikasi merupakan aktifitas merumuskan kesimpulan berdasarkan dua aktifitas sebelumnya. Simpulan ini dapat berupa simpulan sementara maupun simpulan akhir(Nanang martono,2016).

H. Sistematika Penulisan Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, Termasuk pula menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian,

lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan lokasi penelitian yang akan diteliti.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

Pada bab ini khusus membicarakan tentang berbagai materi yang berkaitan topik yang dibahas yaitu mengenai pemindahan wilayah Tegal Binangun dari Kabupaten Banyuasin ke Kota Palembang.

BAB III LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan secara rinci lokasi yang diteliti, meliputi; sejarah, kondisi geografis, politik, budaya, ekonomi, sosial kemudian menjelaskan tujuan dari proses perpindahan wilayah tegal binangun, fasilitas pendukung, jumlah penduduk, struktur organisasi dan menjelaskan pula sejarah perpindahan wilayah Tegal Binangun dari Kota Palembang ke Kabupaten Banyuasin kemudian mengajukan perpindahan untuk kembali lagi ke Palembang,

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan jawaban dari rumusan masalah, yaitu bagaimana Kepentingan elit Politik Pada Proses Perpindahan Wilayah Tegal Binangun Dari Kabupaten Banyuasin Ke Kota Palembang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan dan saran atas keseluruhan hasil penelitian.